



BULANAN PUPR

• • • • • FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH • • • • •

MEMBANGUN INFRASTRUKTUR PUPR
KE PELOSOK NEGERI :
SEBUAH TANTANGAN



SINKRONISASI

DAN HARMONISASI DAK FISIK INFRASTRUKTUR PUPR TA. 2022

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
DAN BIMBINGAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN DAK
BIDANG IRIGASI TAHUN 2021

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI
JALAN DAERAH BANTEN DAN JAWA
BARAT TAHUN 2021

BINWAS DAK BIDANG AIR MINUM,
SANITASI, DAN PERUMAHAN &
PERMUKIMAN TA 2021

CATATAN TIM REDAKSI

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) bertugas untuk meningkatkan kemantapan infrastruktur PUPR daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan air; konektivitas dan aksesibilitas bagi penguatan daya saing; dan layanan infrastruktur dasar sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. PFID berusaha untuk terus menerus melaksanakan kegiatan mulai dari tahap perencanaan; pemrograman; pembinaan dan pengawasan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan Infrastruktur daerah demi tercapainya tugas diatas agar dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Buletin PFID ini berisi tentang peraturan, kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh 4 (empat) bidang di PFID yaitu Bidang Perencanaan Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Bidang Pelaksanaan DAK Jalan dan Jembatan, Bidang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air, dan Bidang Pelaksanaan DAK Perumahan dan Permukiman. Buletin PFID Edisi ke-7/Juli-September Tahun 2021 ini bertema tentang Focus Group Discussion (FGD) dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi Tahun 2021, Sinkronisasi dan Harmonisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Irigasi TA. 2022, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jalan Daerah Banten dan Jawa Barat Tahun 2021, Peran Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dalam Pengelolaan DAK Fisik Infrastruktur PUPR, FGD Pekerjaan Penyusunan Template Dokumen Analisa Koridor Prioritasi Pembangunan Jalan Daerah, BINWAS DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan & Permukiman TA 2021, Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan, Capaian Manfaat Pengelolaan DAK Wilayah Timur dalam Mendukung Prioritas Nasional dan Focus Group Discussion Masukan Draft Petunjuk Teknis DAK Fisik T.A. 2022.

Selamat membaca.

Tim Redaksi

SUSUNAN TIM REDAKSI

Pelindung

Mohammad Zainal Fatah

Penanggung Jawab

Riono Suprapto

Dewan Redaksi

Anum Kurniawan
Sari Satria Dwipayana
Nova Dorma Sirait
Andie Pramudita Said
Wara Novela

Pemimpin Redaksi

Rosita Darmastuti

Anggota Redaksi

Hidemiwan, Hery Heryana,
Desi Meriana,
Irma Rahmawati, Indah
Indriaspriati, Leviana Okvianty,
Rethon M. Canopy

Penyunting Redaksi

Indra Jaya KGP, Arbisani,
Rani Nur. I, Arif Furqan

Bagian Produksi

Agus Sugiono, Dewi Udiarti,
Zamzuli, Asep Sultoni

Bagian Distribusi

Eka Widyaningtyas
Didik Santoso

Kontributor

Anum Kurniawan,
Nova Dorma Sirait,
Indah Indriaspriati, Irma
Rahmawati, Leviana Okvianty,
Rethon M. Canopy, Muhamad
Taufik, Indra Jaya KGP, Brigitta
Yolanda, Rizky Ananda, Pujiati
Rahayu, Afirma Kitania,
Naufal Fikri, Eka Widyaningtyas,
Masfufahut Thohuroh

Desain

Prayudi Anggia

Alamat Redaksi

Gedung Heritage PUPR Lt.4
Jl. Pattimura No.20,
Kebayoran Baru Jakarta Selatan,
12110,



021-27932834



pfid.setjen@pu.go.id



<https://setjen.pu.go.id/pfid/>



Pusat FID



@pusatfid

**FOCUS GROUP DISCUSSION
(FGD) DAN BIMBINGAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN DAK
BIDANG IRIGASI TAHUN 2021**

5



**KEGIATAN MONITORING DAN
EVALUASI JALAN DAERAH BANTEN
DAN JAWA BARAT TAHUN 2021**

11



**FOCUS GROUP DISCUSSION
PEKERJAAN PENYUSUNAN
TEMPLATE DOKUMEN ANALISA
KORIDOR PRIORITISASI
PEMBIAYAAN JALAN DAERAH**

21



**SINKRONISASI DAN HARMONISASI
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
BIDANG IRIGASI TA. 2022**

8



**WAWANCARA KEPALA PUSAT PFID :
PERAN PUSAT FASILITASI
INFRASTRUKTUR DAERAH
DALAM PENGELOLAAN DAK FISIK
INFRASTRUKTUR PUPR**

16





SINKRONISASI DAN HARMONISASI
DAK BIDANG AIR MINUM,
SANITASI, DAN PERUMAHAN
TA. 2022

30

BINWAS DAK BIDANG AIR MINUM,
SANITASI, DAN PERUMAHAN &
PERMUKIMAN TA 2021

24



CAPAIAN MANFAAT PENGELOLAAN DAK WILAYAH TIMUR DALAM MENDUKUNG
PRIORITAS NASIONAL

32

FOCUS GROUP DISCUSSION
MASUKAN DRAFT PETUNJUK TEKNIS
DAK FISIK T.A. 2022

34





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DAN BIMBINGAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAK BIDANG IRIGASI TAHUN 2021

Oleh : Nova Dorma Sirait
Irma Rahmawati
Masfufahut Thohuroh

Dana Alokasi Khusus atau sering disebut DAK Tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional melalui kebijakan berbasis tematik (khususnya pariwisata dan IKM; *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani; serta Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif). Penyelenggaraan DAK merupakan salah satu dukungan Pemerintah Pusat terhadap daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah serta

memeratakan pembangunan. DAK Bidang Irigasi sendiri merupakan salah satu bidang dalam DAK TA 2022 yang masuk dalam jenis DAK Penugasan untuk mendukung tematik (2) ‘Pengembangan *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani’ bersama dengan 5 bidang DAK lainnya yaitu: Pertanian; Kelautan Perikanan; Kehutanan; Jalan dan Perdagangan.

Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*Food Estate*) dalam rangka memperkuat cadangan pangan pemerintah melalui pengembangan lumbung pa-

ngan di luar Pulau Jawa dilakukan dengan memperhatikan 5 prinsip, yaitu: 1) Keberlanjutan; 2) Integratif; 3) Resilien; 4) Inklusif; 5) Maju dan Modern. Dengan demikian, arah kebijakan DAK tematik Pengembangan *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani yaitu:

1. Memfasilitasi dan mendukung pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*Food Estate*) dan daerah pendukungnya secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pemulihhan ekonomi nasional; serta



2. Meningkatkan *ownership* dan kapasitas daerah dalam pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*Food Estate*) dan daerah pendukungnya.

Dengan sasaran DAK tematik Pengembangan *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani yaitu:

1. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana dalam pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*Food Estate*); dan
2. Terintegrasinya pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*Food Estate*) hulu-hilir.

Kegiatan bantuan teknis penyelenggaraan DAK bidang irigasi tahun 2021 dilaksanakan sejak bulan April 2021 dan akan berakhir pada Bulan Desember 2021 dengan melibatkan 18 Pemerintah Daerah sebagai pilot project. 18 Pemerintah Daerah yang dimaksud yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Banyuasin. Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur dan Ka-

bupaten Bogor. Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kayong Utara. Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Provinsi Sulawesi Tenggara, Kab. Buton Utara, dan Kabupaten Konawe. Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang dan Kota Kupang

Kegiatan Bantuan Teknis Penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi Tahun 2021 dimaksudkan untuk Memberikan bantuan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi DAK untuk meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan irigasi kepada Pemda penerima DAK Bidang Irigasi.

Sasaran dari terlaksananya kegiatan Bantuan Teknis Penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi Tahun 2021 adalah Terlaksananya bantuan teknis kepada Pemda sehingga dapat meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi secara optimal. Teridentifikasinya dan terselesaikannya masalah/kaidah teknik/*engineering* pada saat penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi. Dan Tersusunnya laporan data dan informasi penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi di Pemda secara berkala kepada PFID.

ering pada saat penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi. Dan Tersusunnya laporan data dan informasi penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi di Pemda secara berkala kepada PFID.

Lingkup kegiatan Bantuan Teknis Penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi Tahun 2021 meliputi penyusunan indikator capaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan, pengumpulan data dan informasi seluruh tahap penyelenggaraan DAK di setiap Pemda, terutama terkait permasalahan teknis dan tata kelola, penyusunan modul bantuan teknis, meliputi modul petunjuk pelaksanaan survey kondisi dan kinerja irigasi (e-PAKSI), modul petunjuk penyusunan data teknis irigasi daerah, modul petunjuk perencanaan teknis dan pemrograman, modul petunjuk pengadaan barang jasa, modul petunjuk pengawasan pelaksanaan kontruksi, dan modul petunjuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Irigasi, pemberian bantuan teknis pada tahapan pelaksanaan survey kon-



Foto Bersama FGD dan Bimbingan teknis penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi Tahun 2021

disi dan kinerja irigasi (ePAKSI), perencanaan teknis dan pemrograman, pengadaan barang jasa, pengawasan pelaksanaan kontruksi, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Irigasi, Memberikan rekomendasi/solusi teknis terhadap pemasalahan teknik dalam pelaksanaan DAK Bidang Irigasi kepada PFID dan Penerima DAK Bidang Irigasi, Membantu Tim Pelaksana Bantuan Teknis Penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, Balai/Balai Besar Wilayah Sungai dan dinas terkait lainnya (Bappeda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dsb) dalam melaksanakan DAK Bidang Irigasi, Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek), *Focus Group Discussion* (FGD), dan Rapat Koordinasi terkait pelaksanaan Bantuan Teknis Penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi, perjalanan dinas dan/ atau survei di Provinsi/Kabupaten yang dibutuhkan/diperintahkan oleh pengguna jasa, Memproduksi audio visual dokumentasi dan hal lain terkait pelaksanaan Bantuan Teknis Penyelenggaraan DAK Bi-

dang Irigasi TA dan seluruh kegiatan DAK Provinsi dan Kabupaten yang dibutuhkan/diperintahkan oleh oleh pengguna jasa, Mengukur indikator capaian keberhasilan pelaksanaan Bantuan Teknis, mulai dari awal sampai dengan berakhirnya kegiatan, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan Melakukan kegiatan lain yang dibutuhkan/ diperintahkan oleh PFID terkait Bantek Penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang melibatkan Pemerintah Daerah selaku perencana, pengelola dan pelaksana DAK Irigasi di daerah, untuk mencapai sasaran DAK tematik Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani. Rangkaian kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi Tahun 2021 pada acara ini yaitu:

1. Sesi pertama yaitu sesi Bimbingan Teknis yang diisi oleh beberapa narasumber, diantaranya:
 - a. Kepala Pusat Fasilitasi Infra-

struktur Daerah memaparkan mengenai Pentingnya Kegiatan Bantuan Teknis dalam Penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi;

- b. Kepala Bidang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah memaparkan mengenai Bantuan Teknis Penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi TA. 2021;
- c. Tim Konsultan memaparkan mengenai Modul - modul yang telah dihasilkan;
2. Sesi kedua yaitu sesi desk untuk FGD yang dibagi menjadi 6 desk verifikator. Mekanisme untuk masing-masing desk dilakukan dengan cara konsultasi teknis, Konsulasi yang telah dilakukan meliputi pemberian konsulasi terkait pekerjaan yang sudah dan akan dilaksanakan dan yang direncanakan. Kedepannya diharapkan dengan adanya bantuan teknis ini kepada Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kemampuan Dalam menyusun DAK bidang Irigasi *

SINKRONISASI DAN HARMONISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG IRIGASI TA. 2022

Oleh : Nova Dorma Sirait
Indah Indriaspri
Rizky Ananda

Dana Alokasi Khusus atau sering disebut DAK Tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional melalui kebijakan berbasis tematik (khususnya pariwisata dan IKM; *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani; serta Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif). Penyelenggaraan DAK merupakan salah satu dukungan Pemerintah Pusat terhadap daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah serta memeratakan pembangunan. DAK Bidang Irigasi sendiri merupakan salah satu bidang dalam DAK TA 2022 yang masuk dalam jenis DAK Penugasan untuk mendukung tematik (2) ‘Pengembangan *Food Estate* dan Pengu-

atan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani bersama dengan 5 bidang DAK lainnya yaitu: Pertanian; Kelautan Perikanan; Kehutanan; Jalan dan Perdagangan.

Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*food estate*) dalam rangka memperkuat cadangan pangan pemerintah melalui pengembangan lumbung pangan di luar Pulau Jawa dilakukan dengan memperhatikan 5 prinsip, yaitu: 1) Keberlanjutan; 2) *Integratif*; 3) *Resilient*; 4) *Inklusif*; 5) Maju dan Modern. Dengan demikian, arah kebijakan DAK tematik Pengembangan *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani yaitu:

1. Memfasilitasi dan mendukung pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*Food Estate*)

dan daerah pendukungnya secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pemulihhan ekonomi nasional; serta

2. Meningkatkan *ownership* dan kapasitas daerah dalam pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*Food Estate*) dan daerah pendukungnya.

Dengan sasaran DAK tematik Pengembangan *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani yaitu:

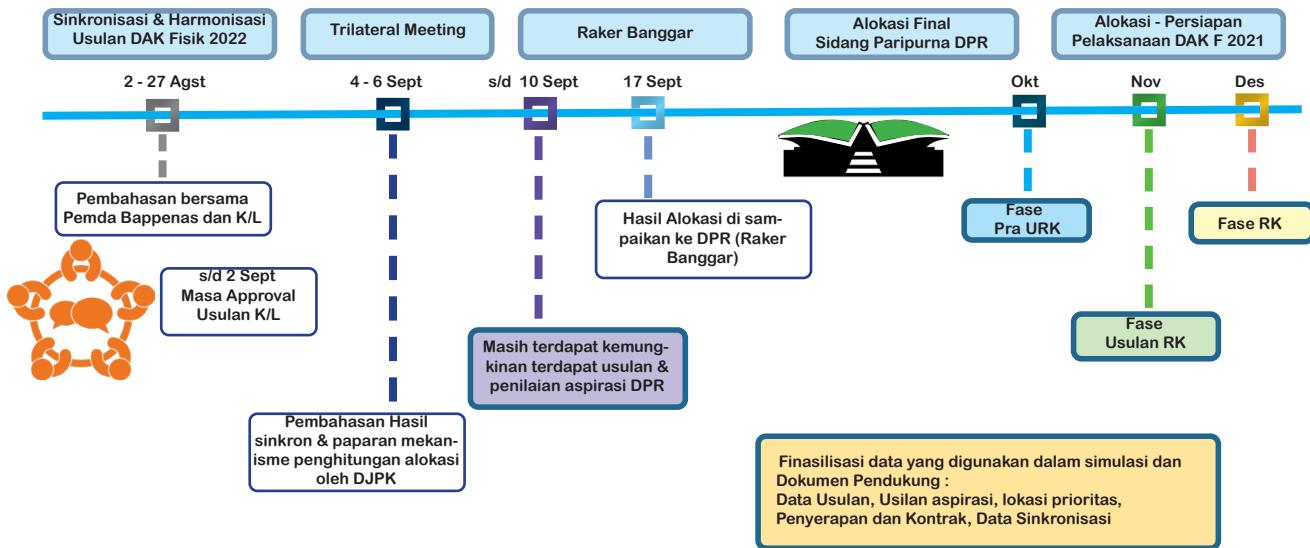
1. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana dalam pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*Food Estate*); dan
2. Terintegrasinya pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*Food Estate*) hulu-hilir.

Sesuai dengan *Timeline* Pengusulan DAK 2022, saat ini Pengusulan DAK sudah memasuki fase Sinkronisasi dan Harmonisasi yang dimulai sejak Bulan Juli hingga 26 Agustus 2021 sampai dengan 27 Agustus 2021. Fase Sinkronisasi dan Harmonisasi merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tahap awal yang telah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (FID) dan Dit. Pengairan dan Irigasi Bappenas didalam Aplikasi KRISNA dengan status penilaian awal *approve* dan *discuss*. Untuk penilaian dalam fase Sinkronisasi dan Harmonisasi Bidang Irigasi melakukan penilaian secara *online* yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli sampai dengan 26 Agustus



Pembukaan Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik Bidang Irigasi Oleh Kepala Pusat FID

TIMELINE PENGALOKASIAN



2021, dengan mengundang 270 Pemerintah Daerah Pengusul DAK Bidang Irigasi TA 2022.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang melibatkan Pemerintah Daerah selaku perencana, penge-lola dan pelaksana DAK Irigasi di daerah, untuk mencapai sasaran DAK tematik Pengembangan *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani. Rangkaian kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Bidang Irigasi pada acara ini yaitu:

1. Sesi pertama yaitu sesi panel yang diisi oleh beberapa narasumber, diantaranya:
 - a. Kepala Bidang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah memaparkan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Sinkronisasi dan Harmonisasi;
 - b. Direktur Irigasi dan Rawa, Kementerian PUPR memaparkan mengenai Kriteria Penilaian Teknis Kegiatan Pembangunan/Peningkat-

an/Rehabilitasi Jaringan Irigasi;

c. Direktur Sungai dan Pantai, Kementerian PUPR memaparkan mengenai Kriteria Penilaian Teknis Kegiatan Infrastruktur Pengendali Banjir

2. Sesi kedua yaitu sesi desk yang dibagi menjadi 9 desk dengan pembagian 6 desk verifikator 1 untuk menu kegiatan Peningkatan dan Rehabilitasi jaringan irigasi, 1 desk untuk menu Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir, 1 desk untuk menu Pembangunan Jaringan Irigasi dan 1 desk verifikator 2.

Mekanisme untuk masing-masing desk dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, dengan rincian sebagai berikut:

1. *Desk* verifikator 1 menu kegiatan Peningkatan dan Rehabilitasi jaringan irigasi melakukan verifikasi terkait kelengkapan dokument teknis maupun penunjang sesuai catatan pembahasan awal penilaian serta melakukan pengurutan prioritas.

2. *Desk* menu Pembangunan Irigasi dan Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir melakukan verifikasi dengan mekanisme yang diawali Pemaparan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pengusul. Kesesuaian dan kelengkapan dokumen teknis dan penunjang-pun dilakukan verifikasi oleh tim verifikator.

3. *Desk* Verifikator 2 merupakan desk verifikasi akhir penilaian sebagai lanjutan dari poin 1 dan 2.

Penyelenggaraan kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Bidang Irigasi TA 2022 mengundang sebanyak 270 Pemerintah Daerah yang dihadiri via online sebanyak 257 Pemerintah Daerah sedangkan sebanyak 13 Pemerintah Daerah tidak menghadiri kegiatan ini. Namun terdapat 6 Pemerintah Daerah yang mengundurkan diri saat Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Bidang Irigasi TA 2022, dengan demikian maka hanya terdapat 251 Pemerintah Daerah yang menyelesaikan rangkaian pembahasan Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK

**RAPAT KOORDINASI HASIL PENILAIAN
SINKRONISASI DAN HARMONISASI
DAK BIDANG IRIGASI TA 2022**

Bogor, 25-27 Agustus 2021



Rapat Koordinasi Hasil Penilaian Simoni

Bidang Irigasi TA 2022 sampai dengan selesai. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu:

1. Verifikasi kesiapan data teknis dan dokumen pendukung.
2. Verifikasi rancangan desain teknis dan standar biaya usulan yang telah disetujui (*approve/discuss*) di tahap sebelumnya.
3. Penyelarasan dan penajaman urutan prioritas kegiatan (*long list* menjadi *shortlist*).
4. Konfirmasi usulan aspirasi DPR-RI.

Secara keseluruhan, pelaksanaan acara Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Bidang Irigasi TA 2022 ini berjalan dengan lancar dan Pemerintah Daerah berpartisipasi aktif selama penyelenggaraan acara ini. Tindak lanjut dari acara ini adalah memproses usulan DAK Bidang Irigasi Bersama Kemente-

rian Keuangan dan Bappenas terhadap hasil dari tahap Sinkronisasi dan Harmonisasi ini sampai dengan proses penetapan pagu alokasi per Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tindaklanjut Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dari terselesaikannya rangkaian kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Bidang Irigasi TA 2022 yaitu melaksanakan Rapat Koordinasi terkait hasil Penilaian Sinkronisasi dan Harmonisasi tersebut bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas, Dit. Irigasi dan Rawa, serta Dit. Sungai dan Pantai. Berdasarkan pembahasan hasil Penilaian Sinkronisasi dan Harmonisasi dalam Rapat Koordinasi tersebut, diketahui bahwa terdapat 247 Pemerintah Daerah Pengusul DAK Bidang Irigasi yang memiliki status *Approve* dan *Stock Program* dalam Aplikasi KRISNA yang terdiri dari 895 paket kegiatan dengan

nilai Rp. 1.664,47 Miliar. Selain itu juga, untuk usulan Aspirasi DPR RI terdiri 20 Pemerintah Daerah yang memiliki status *Approve* dan *Stock Program* dalam Aplikasi KRISNA yang terdiri dari 55 paket kegiatan dengan nilai Rp. 100,21 Miliar. Selain penilaian *Approve* dan *Stock Program* terdapat 4 Pemerintah Daerah dengan status penilaian *All Reject*, sehingga terdapat 23 Pemerintah Daerah yang tidak mendapatkan alokasi DAK TA 2022.

Dengan terfokusnya daerah-daerah yang mendapatkan alokasi DAK khususnya bidang Irigasi serta pembinaan-pembinaan yang telah dilakukan oleh Pusat FID kepada Pemerintah Daerah, diharapkan Pemerintah Daerah dapat lebih siap dalam menyiapkan dokumen perencanaan untuk pengusulan DAK Bidang Irigasi tahun-tahun selanjutnya *



Ruas Jalan , Kab Lebak, DAK 2020

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI JALAN DAERAH BANTEN DAN JAWA BARAT TAHUN 2021

Oleh : Muhamad Taufik

Salah satu infrastruktur kewenangan daerah yang perlu diperkuat untuk memenuhi target RPJMN adalah Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota (Jalan Daerah), yang mencangkup sekitar 90% dari total jaringan jalan di Indonesia. RPJMN telah menargetkan kemantapan jalan Provinsi sebesar 75% dan Jalan Kabupaten / Kota sebesar 65%. Namun sampai dengan akhir tahun 2019 masih terjadi *backlog* kemantapan jalan sekitar 60%. RPJMN telah mengamanatkan strategi untuk pencapaian target tersebut melalui (i) perbaikan mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Ja-

lan dan (ii) mengembangkan pola / skema pembiayaan *cost sharing* antara APBD dan APBN dalam penanganan Jalan Daerah melalui skema Hibah yaitu PRIM (*Provincial Road Improvement and Maintenance*) dan PHJD (Program Hibah Jalan Daerah). Selain kedua pendekatan tersebut dilakukan pula kerjasama *Japan International Co-operation Agency* (JICA) dengan Pemerintah Kota untuk meningkatkan tata kelola perencanaan dan pemrograman Jalan Kota.

Kondisi dan permasalahan penyelenggaraan jalan daerah belum sesuai dengan target dan sasaran RPJMN atau Rencana Strategis terkait pencapaian kemantapan jalan, hal ini khususnya terkait

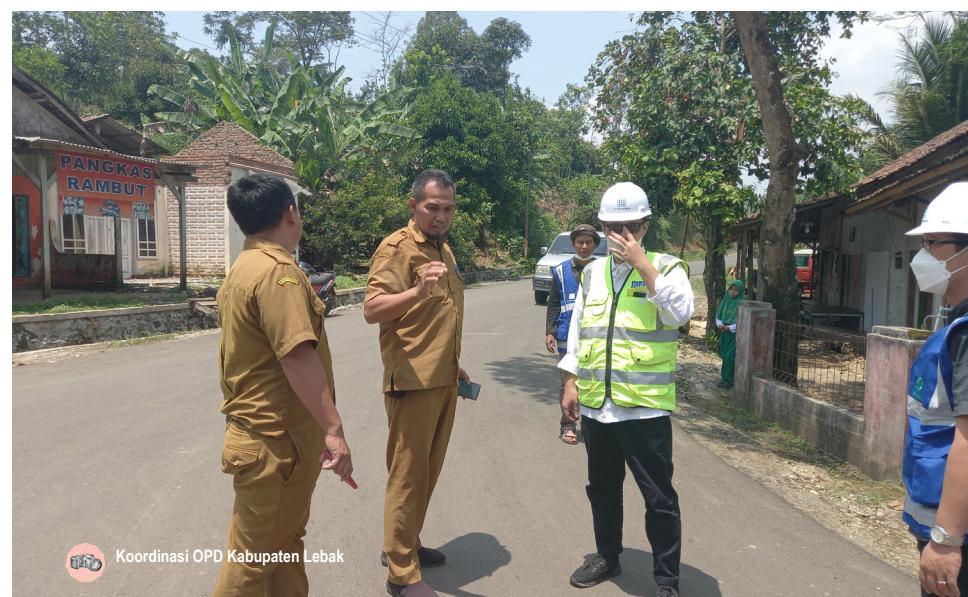
dengan perencanaan teknis yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dan hasil pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan sehingga umur rencana jalan tidak tercapai.

Disisi lain Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR di daerah belum memenuhi kompetensi teknis yang diperlukan untuk penanganan jalan yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Peningkatan kompetensi SDM di daerah dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan perencanaan teknis melalui kegiatan pembinaan saat ini masih sangat terbatas.

Penyelenggaraan DAK sampai dengan saat ini masih dinilai belum dapat mencapai target yang ditetapkan, hal ini terlihat dari setiap tahun pemerintah pusat melalui APBN Perimbangan (DAK) mengalokasikan pagu anggaran DAK Bidang Jalan yang semakin besar tetapi kinerja tata kelola dan kualitas pembangunan fisik tidak terjadi peningkatan sehingga berdampak kepada kemantapan jalan yang stagnan.

Selain menyiapkan konsep kebijakan kedepan, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Bidang Penyelenggaraan DAK Jalan dan Jembatan juga akan melakukan evaluasi terkait kegiatan perencanaan dan pemrograman 5 (lima) tahun ke belakang dimana hal tersebut dimaksudkan untuk melakukkan evaluasi di setiap tahap pelaksanaannya, terkait hal-hal yang perlu diperbaiki atau dikembangkan. Evaluasi tersebut mencakup kegiatan perencanaan secara keseluruhan mulai dari kegiatan verifikasi data teknis, verifikasi usulan sampai dengan kegiatan konsultasi program DAK.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Bab V terkait Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Kementerian PUPR melalui PFID melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap progress fisik dan keuangan, ketepatan waktu penyelesaian kegiatan terhadap realisasi fisik dan keuangan atas pekerjaan yang telah selesai. Selain itu juga dievaluasi juga capaian hasil dan juga dampak, yang merupakan perubahan yang terjadi sebagai akibat dari hasil kegiatan dan keberlanjutan fungsi dari hasil kegiatan.



Kunjungan monitoring evaluasi Banten dan Jawa Barat

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dari tanggal 20 September sampai dengan 1 Oktober 2021 Tim PFID Bidang Jalan melaksanakan kunjungan monitoring dan evaluasi terhadap 2 propinsi yaitu Banten yang diwakili oleh OPD Kabupaten Lebak, dan Propinsi Jawa Barat yang diwakili oleh OPD Kabupaten Subang. Pada kunjungan monev ini difokuskan memonitor kegiatan tahun 2021 dan 2020

dengan output progress fisik dan keuangan yg sudah berjalan. Selain kegiatan pada tahun 2020 dan 2021, dimonitor juga kegiatan penanganan tahun 2018 (N-3) dengan output dampak ekonomi maupun sosial yang dihasilkan bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan.

Pada tanggal 20 September 2021, tim dari PFID Bidang Jalan berangkat menuju Kab Lebak di dampingi oleh tim Konsultan Bantek dan dijadwalkan kembali ke Jakarta pada tanggal 22 Septem-



Ruas Jalan Sampay – Gunungkencana, Kab Lebak, DAK 2020

ber 2021. Tim PFID Bidang Jalan tersebut berkoordinasi dengan pihak OPD dari Kab Lebak terkait kebutuhan data yang diperlukan dan ruas-ruas mana saja yang akan ditinjau. Dalam kegiatan koordinasi ini, pihak OPD Lebak menyampaikan paparan terkait progress pekerjaan yang telah dan sedang dilaksanakan beserta dampak bagi masyarakat sekitar, dan juga lokasi ruas jalan yang akan ditangani DAK 2022.

Setelah berkoordinasi dengan dikantor dinas, dilanjutkan dengan kunjungan ke lapangan yaitu ke ruas jalan Sampay - Gunungkencana di Kabupaten Lebak yang merupakan paket kegiatan DAK tahun 2020 dan ruas jalan Tajurhalang - Kalisuren yang merupakan paket kegiatan DAK tahun 2018.



Monitoring Pemda dan Tim Bidang Jalan PFID

Terbangunnya ruas jalan Sampay - Gunungkencana di Kabupaten Lebak telah memberikan dampak yang sangat positif bagi pertumbuhan perekonomian dan social masyarakat setempat dikarenakan jalan tersebut menghubungkan posisi kegiatan masyarakat dengan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, dengan terbangunnya ruas jalan ini dapat mempermudah akses dalam pembangunan jalan tol Serang-Panimbang.

Lokasi berikutnya yang ditinjau adalah ruas jalan Cirinten - Pasirkupa yang ditangani dengan menggunakan dana DAK tahun 2021. Penanganan jalan Cirinten - Pasirkupa ini telah sesuai dengan usulan penanganan yaitu penanganan pemeliharaan berkala sepanjang 6,6 Km. Penanganan jalan ini juga telah dilengkapi unsur-unsur pelengkap badan jalan, terutama faktor kelematan jalan, antara lain melengkapi marka jalan dan memperkeras bahan jalan.

Setelah pemantauan ruas jalan yang telah ditangani, tujuan selanjutnya ada meninjau lokasi ruas jalan yang akan diusulkan untuk ditangani dengan dana DAK tahun 2022. Adapun ruas yang ditinjau adalah Jalan Situregen - Gununggede dengan rencana penanganan sepanjang 7,4 Km. Melihat kondisi actual di lapangan, terlihat jalan eksisting dalam kondisi rusak berat sehingga memenuhi persyaratan dalam penanganan DAK.

Kunjungan monitoring evaluasi ke Kabupaten Lebak ini selesai pada tanggal 22 September 2021. Jadwal kegiatan monitoring evaluasi selanjutnya adalah ke Kabupaten Subang, Jawa Barat, dimulai pada tanggal 29 September sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021. Rencana kegiatan selama kunjungan ke Kabupaten Subang ini sama dengan seperti kunjungan sebelumnya di Kabupaten Lebak,





Ruas jalan Rancabango-Rancaasih, Kab Lebak, DAK 2020

yaitu meninjau progress pelaksanaan paket kegiatan DAK Bidang Jalan tahun 2021, 2020, melihat hasil dampak pelaksanaan kegiatan DAK tahun N-3 (DAK 2018), dan meninjau lokasi ruas jalan yang direncanakan akan ditangani oleh DAK tahun 2022.

Kegiatan pertama pada saat tiba di Kabupaten Subang adalah mengunjungi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang untuk keperluan koordinasi pra kunjungan lapangan. Di kantor dinas tersebut, Tim PFID Bidang Jalan diterima oleh Pak Syawal, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang mana pada saat koordinasi menyampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian PUPR atas bantuananya dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penanganan jalan yang didanai oleh dana DAK. Dalam kesempatan ini pula, tim PFID bersama Dinas Kab Subang membahas ruas-ruas mana saja yang akan ditinjau berikut rute perjalannnya.

Ruas pertama yang dikunjungi adalah ruas jalan Wates-Jatireja yang merupakan ruas jalan yang ditangani menggunakan dana DAK tahun 2018. Ruas jalan ini ditangani dengan peningkatan jalan sepanjang 2,4 Km menghubungkan jalan provinsi dengan pusat perekonomian warga di Kawasan Pamanukan, Kabupaten Subang.

Ruas jalan berikutnya yang ditinjau adalah ruas jalan Ciater-Mariuk yang juga dilaksanakan dengan menggunakan dana DAK 2018. Penanganan ruas jalan ini berupa peningkatan struktur/rekonstruksi sepanjang 2,23 Km yang menghubungkan ruas jalan provinsi dengan kawasan pariwisata Ciater. Dengan adanya ruas jalan ini semakin mempermudah akses masyarakat umum yang ingin masuk Kawasan wisata Ciater.

Berikutnya adalah kunjungan ke ruas jalan Wanaseri-Cibogo yang ditangani menggunakan dana DAK tahun 2021. Ruas jalan ini ditangani dengan cara pening-

katan struktur sepanjang 1,16 Km, dengan progress saat ini sudah mencapai 100 % dan telah sesuai dengan persyaratan teknis yang telah disepakat sebelumnya, antara lain dengan memperkeras penanganan bahu jalan, dll.

Lokasi terakhir yang ditinjau adalah ruas jalan yg akan diusulkan untuk penanganan DAK tahun 2022 yaitu jalan Rancabango-Rancaasih sepanjang 1,6 Km. Ruas jalan ini merupakan usulan dari aspirasi DPR dan diharapkan masuk dalam urutan prioritas penanganan. Selain ruas jalan Rancabango-Rancaasih, ruas lain yang akan ditangani melalui dana DAK 2022 adalah ruas jalan Pagaden-Balingbing sepanjang 5,48 Km yang merupakan jalan akses inspeksi irigasi untuk kawasan pertanian warga sekitar *

PERAN PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAK FISIK INFRASTRUKTUR PUPR

Oleh : Indra Jaya KGP,
Eka Widya Ningtyas, Naufal Fikri,
Tim Buletin PFID

"Membangun Infrastruktur PUPR ke Pelosok Negeri : Sebuah Tantangan"

WAWANCARA :

RIONO SUPRAPTO, SE., ST., MT.
KEPALA PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH

Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur PUPR memiliki posisi yang strategis dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal terutama pembangunan yang didanai DAK. Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dibentuk dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Infrastruktur PUPR yang merupakan kewenangan Daerah baik Provinsi, Kabupaten maupun Pemerintah Kota yang didanai DAK. Tahapan Pelaksanaan DAK sangat kompleks, mulai dari proses Perencanaan dan Pemrograman, Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan. Pembentukan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dibawah naungan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR sesuai dengan amanah Peraturan Menteri PUPR nomor 03 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tim Buletin Pusat FID kali ini berkesempatan untuk mewawancarai Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Bapak Riono Suprapto SE., ST., MT di ruang kerja beliau yang berlokasi di Gedung Heritage lt. 4, Kementerian PUPR. Sosok yang lahir di Jakarta, 55 tahun yang lalu ini merupakan Alumni S2 Magister Teknik Studi Pembangunan ITB, dan telah menjabat sebagai Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah selama 2 tahun bersamaan dengan pembentukan Unit Kerja ini.

Apa saja permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan (DAK)?

Permasalahan yang kami hadapi dalam penyelenggaraan DAK, yang pertama adalah dari segi perencanaan kami menemukan beberapa Pemerintah Daerah yang memiliki kualitas perencanaan yang rendah saat mengusulkan DAK, mulai dari kelengkapan Dokumen Teknis seperti DED maupun dari RAB. Lalu dari proses pelaksanaan, output infrastruktur yang telah selesai dibangun namun kualitas dan mutunya ternyata kurang bagus, hal ini perlu menjadi perhatian oleh Pemda. Sama halnya dengan *outcome* dari infrastruktur tersebut, pemda juga harus memperhatikan mutu, manfaat dan fungsinya juga. Contohnya pada kualitas air bersih harus aman, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak berasa. Kemudian dari segi pelaporan, banyak dari pemerintah daerah yang belum



PETA SEBARAN LOKASI KAB/KOTA Pilot Project DAK INTEGRASI

Kota Langsa (Pemukiman Kembali)

KOTA LANGSA	Air Minum	425 SR	1,512 M
	Sanitasi (Air Limbah)	250 SR	0,950 M
	Sanitasi (Persampahan)	-	-
	Perumahan	250 Unit	12,500 M
	Jalan Lingkungan	8,143 m	19,900 M
	Drainase Lingkungan	5,273 m	-
	TOTAL		34,862 M

Kota Bontang (Konsolidasi)

KOTA BONTANG	Air Minum	230 SR	1,806 M
	Sanitasi (Air Limbah)	200 SR	2,400 M
	Sanitasi (Persampahan)	1 Unit	0,650 M
	Perumahan	200 Unit	10,400 M
	Jalan Lingkungan	1,696m	16,484 M
	Drainase Lingkungan	-	-
	TOTAL		31,741 M

Kab. Tangerang (Konsolidasi)

KABUPATEN TANGERANG	Air Minum	178 SR	1,157 M
	Sanitasi (Air Limbah)	71SR	1,330 M
	Sanitasi (Persampahan)	1 Unit	0,750 M
	Perumahan	71 Unit	3,550 M
	Jalan Lingkungan	839 m	3,213 M
	Drainase Lingkungan	1,235 m	-
	TOTAL		9,980 M

Kab. Pemalang (Konsolidasi)

KABUPATEN PEMALANG	Air Minum	216 SR	1,080 M
	Sanitasi (Air Limbah)	170 SR	1,500 M
	Sanitasi (Persampahan)	1 Unit	0,600 M
	Perumahan	216 Unit	7,980 M
	Jalan Lingkungan	3,509 m	19,170 M
	Drainase Lingkungan	7,000 m	-
	TOTAL		30,330 M

Kab. Kotabaru

KABUPATEN KOTABARU	Air Minum	770 SR	12,745 M
	Sanitasi (Air Limbah)	150 SR	1,330 M
	Sanitasi (Persampahan)	-	-
	Perumahan	150 Unit	7,500 M
	Jalan Lingkungan	367 m	8,812 M
	Drainase Lingkungan	-	-
	TOTAL		22,388 M

Kota Bitung (Pemukiman Kembali)

KOTA BITUNG	Air Minum	200 SR	1,600 M
	Sanitasi (Air Limbah)	200 SR	1,600 M
	Sanitasi (Persampahan)	1 Unit	0,600 M
	Perumahan	200 Unit	10,621 M
	Jalan Lingkungan	2,075 m	9,317 M
	Drainase Lingkungan	3,612 m	-
	TOTAL		24,138 M

Kota Tual (Konsolidasi)

KOTA TUAL	Air Minum	300 SR	1,500 M
	Sanitasi (Air Limbah)	300 SR	1,800 M
	Sanitasi (Persampahan)	-	-
	Perumahan	300 Unit	18,300 M
	Jalan Lingkungan	1,240 m	9,500 M
	Drainase Lingkungan	1,065 m	-
	TOTAL		31,100 M

Kota Termate (Konsolidasi)

KOTA TERMATE	Air Minum	80 SR	0,320 M
	Sanitasi (Air Limbah)	150 SR	0,900 M
	Sanitasi (Persampahan)	1 Unit	0,600 M
	Perumahan	63 Unit	3,498 M
	Jalan Lingkungan	300 m	2,892 M
	Drainase Lingkungan	690 m	-
	TOTAL		8,210 M

Kota Kediri (Konsolidasi)

KOTA KEDIRI	Air Minum	100 SR	0,500 M
	Sanitasi (Air Limbah)	205 SR	2,100 M
	Sanitasi (Persampahan)	1 Unit	0,600 M
	Perumahan	65 Unit	3,250 M
	Jalan Lingkungan	516 m	1,390 M
	Drainase Lingkungan	1,022 m	-
	TOTAL		7,840 M

melakukan pelaporan melalui aplikasi e-Monitoring DAK sesuai dengan Petunjuk Operasional. Lalu tantangannya adalah bagaimana memanajemen kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah dengan kemampuan penganggaran infrastruktur, dimana idealnya alokasi anggaran infrastruktur yaitu sekitar 5% dari PDB, sementara eksisting baru sekitar 2-3% dari PDB.

Pembinaan apa saja yang telah dilakukan oleh PFID kepada OPD dalam penyelenggaraan DAK?

Karena permasalahan dan tantangan yang kami hadapi cukup besar, kami melakukan pembinaan yang komprehensif di semua bidang. Dari sisi pengusulan DAK adalah dengan mensosialisasikan kepada Pemda untuk mengusulkan kegiatan sesuai dengan *readiness criteria* yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan RPJMN, selain itu kami menentukan jenis DAK Reguler dan jenis DAK Penuh-gasan pada aplikasi KRISNA DAK.

Semua kegiatan dalam pengusulan ini harus didukung dengan database dari Pemda yang *up to date* dan akurat. Lalu dari sisi pelaksanaan kami melakukan pembinaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fisik di lapangan kepada seluruh pihak-pihak pelaksana DAK mulai dari tingkat direksi hingga kontraktor agar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Kemudian dari segi pelaporan dan evaluasi kami melakukan pembinaan terkait pelaporan melalui aplikasi e-Monitoring. Kami berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan kepada pemda dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan tata laksana penyelenggaraan DAK.

Inovasi apa saja yang sudah dikembangkan oleh PFID dalam penyelenggaraan DAK?

Inovasi yang kami lakukan sampai saat ini adalah pengintegrasian DAK untuk Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan TA. 2021, bisa kami sebut DAK Integrasi dengan mengkolaborasikan pelaksanaan 3 (tiga) bidang DAK yaitu Bidang Air

Minum, Sanitasi dan Perumahan dalam satu kawasan permukiman. Tujuan dari DAK Integrasi ini adalah untuk mewujudkan permukiman yang layak huni sesuai dengan 4 (empat) indikator minimal rumah layak huni yaitu ketahanan bangunan, luas bangunan, sanitasi dan air minum. Program ini merupakan salah satu upaya pemenuhan hak masyarakat untuk dapat menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, sejatis, dan teratur. Selain itu, DAK integrasi berupaya mendukung mandat *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mendorong peningkatan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat untuk mencegah berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru serta menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Kami juga melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di daerah dengan skema pendanaan yang bersumber dari hibah yaitu program Hibah Jalan Daerah (PHJD). PHJD merupakan pemberian Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang bersumber dari APBN rupiah murni. PHJD ini dimaksudkan untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) serta Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan Daerah. PHJD juga sebagai insentif kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten untuk dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan sektor jalan kepada masyarakat.

Selain dua hal tersebut, kami sadari kehadiran internet dan munculnya media sosial membuat masyarakat lebih aktif memperoleh dan menyebarkan informasi. Tak terkecuali bagi masyarakat Indonesia, apalagi pengguna aktif media sosial terus bertumbuh setiap tahunnya. Kondisi tersebut membuat kami berinovasi untuk membuat sebuah tim sosial media agar kami memiliki kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan pemerintah daerah dan masyarakat penerima manfaat DAK.

Bagaimana perkembangan sistem informasi yang ada di PFID dalam penyelenggaraan DAK?

Saat ini kami menggunakan 4 aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan kami, diantaranya e-Monitoring DAK berfungsi sebagai sistem informasi pelaporan pelaksanaan DAK tahun berjalan. Lalu SiPDJD (Sistem Pengelolaan Database Jalan Daerah) berfungsi sebagai database kemantapan jalan dan juga sebagai salah satu alat verifikasi DAK Bidang Jalan. Kemudian e-PAKSI (Elektronik Pengelolaan

Aset Irigasi dan Kinerja Sistem Irigasi) berfungsi sebagai database irigasi dan juga sebagai salah satu alat verifikasi DAK Bidang SDA. Dan yang terakhir adalah SiCalmers (Sistem Informasi Capaian Air Minum, Air Limbah, Perumahan dan Persampahan), berfungsi sebagai sistem informasi penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pemenuhan data capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

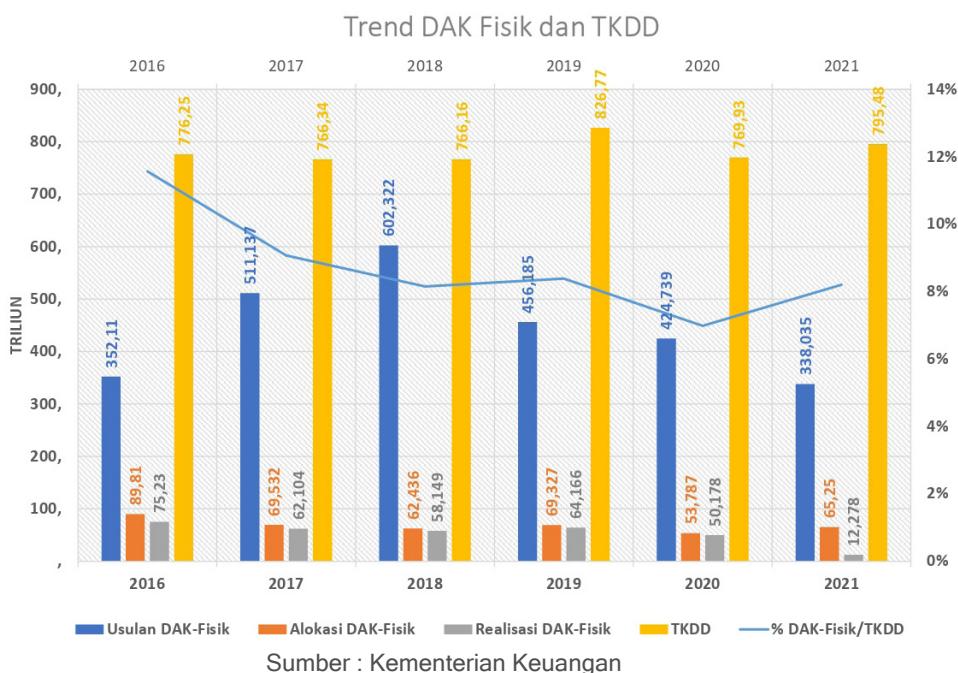
Apa kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2022 dalam menghadapi situasi Pandemi Covid-19 ?

Kebijakan DAK Fisik TA 2022 dalam situasi pandemi COVID-19 mengacu pada upaya mewujudkan prioritas nasional dan prioritas daerah seperti melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon dampak pandemi COVID-19. Ada 2 (dua) jenis DAK, yang pertama dalam penyelenggaraan DAK berbasis Reguler, kami melanjutkan penguatan atas pemerataan layanan dan

penyediaan infrastruktur dasar di daerah. Dalam Penyelenggaraan DAK berbasis Tematik, kami memberikan dukungan pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan Industri Kecil Menengah (IKM); Dukungan *Food Estate* dan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani; dan Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua.

Menteri PUPR, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc memberikan arahan melalui pendekatan OPOR , yaitu :

1. Memberi perhatian lebih pada kegiatan-kegiatan prioritas untuk infrastruktur yang sudah terbangun melalui OPOR (Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, Rehabilitasi) tahun 2022.
 - a. Optimalisasi : Semua proyek pembangunan yang sudah selesai harus segera dimanfaatkan. (Bendungan, Rumah Susun, SPAM, dll)
 - b. Pemeliharaan : Utamakan program pemeliharaan in-



frastruktur yang telah terbangun (Tanggul Sungai dan Pantai, Jalan dan Jembatan, dll).

- c. Operasi : Seluruh infrastruktur baru harus langsung dapat beroperasi (SPM Jalan Tol, Irigasi, Bendungan, dll)
 - d. Rehabilitasi : Utamakan program rehabilitasi (Bendungan, Sumur Bor, Sekolah, Pasar, dll)
2. Agar Selektif dalam perencanaan dan pemrograman, pastikan pembangunan maupun penyusunan DED/kajian hanya untuk infrastruktur yang sudah dapat beroperasi pada 2023/2024.

Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan atau diinginkan oleh daerah saat ini?

Secara umum OPD membutuhkan pembinaan pelaksanaan DAK, bimbingan teknis perencanaan teknis yang membahas tentang penyusunan DED dan dokumen teknis lainnya. Kemudian pelatihan kepada Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan sosialisasi Pelaporan Kegiatan DAK melalui e-Monitoring DAK (menginput dan mengaplikasikan). Semua ini dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pelaksanaan DAK agar semakin baik.

Bagaimana cara bapak dalam meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara PUPR dalam hal ini PFID dengan K/L lain seperti Kemenkeu, Bappenas, dan Kemendagri?

Yang kami lakukan adalah dengan senantiasa menjalin komunikasi aktif melalui tatap muka maupun *video conference* seperti berkoordinasi melalui rapat-rapat rutin dan melakukan tinjauan lapangan bersama. Masing-masing (Pemerintah Daerah dan K/L) pasti punya ide dan harapan, dan kita satukan untuk menjadi panduan mekanisme pelaksanaan DAK ke depannya. Jika dalam proses pelaksanaan DAK tidak berjalan sebagaimana mestinya, harus langsung dibahas secara bersama agar seluruh *stakeholder* mengetahui dan mencari solusi yang terbaik.

Apakah Sumber Daya Manusia yang ada di PFID sudah mencukupi kebutuhan dalam penyelenggaran infrastruktur daerah?

Dengan jumlah pemda yang kami tangani cukup besar yaitu 541 pemda, memang SDM yang tersedia belum cukup, namun kami optimalkan semaksimal mungkin untuk bisa melayani sesuai dengan tugas dan fungsi kami. Oleh karena itu, seluruh pegawai Pusat FID harus memiliki kompetensi yang baik, sehingga bisa melayani dengan cepat dan berkualitas. Selama hampir 3 tahun ini kami memberikan pelayanan dengan baik dan respon dari pemda juga baik.





Bagaimana upaya serta kebijakan Pusat FID dalam rangka mengurangi dampak pandemi COVID-19 terhadap daerah dalam mengantisipasi timbulnya pengangguran?

Sejalan dengan sasaran pembangunan Infrastruktur PUPR, yang mana selama pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur difokuskan pada program padat karya yang memperhatikan protokol kesehatan dan percepatan program guna mencapai target pembangunan jangka menengah hingga 2024. Perencanaan dan program pembangunan infrastruktur PUPR di masa pandemi ini juga diprioritaskan untuk pemulihian ekonomi nasional yang bersinergi dengan pencapaian Program Strategis Nasional (PSN), antara lain dukungan untuk pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), percepatan pembangunan kawasan Industri (KI), pengembangan Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK), kawasan metropolitan, serta pembangunan infrastruktur dalam mendukung *Food Estate*. Dan juga, kita harus berpedoman pada Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam Penyelegaraan Jasa Konstruksi.

Bagaimana hubungan antara PFID dengan Pimpinan Daerah dan anggota DPRD?

Hubungan kami saat ini sangat baik, Pemerintah daerah bersama DPRD biasanya melakukan audiensi ke tempat kami terkait kebutuhan-kebutuhan program kegiatan yang dapat diakomodir melalui DAK, kami tentunya akan memberikan solusi dan arahan sehingga mereka dapat mengusulkan melalui aplikasi KRISNA DAK sehingga kebutuhan-kebutuhan pemda dapat terpenuhi demi kesejahteraan masyarakat di daerah.

Intinya membangun infrastruktur PUPR ke pelosok negeri adalah sebuah tantangan. Bagaimana menurut Bapak?

Menurut saya ini adalah tantangan yang luar biasa, melayani 541 pemda yang apabila tanpa semangat juang yang tinggi dari pemda dan K/L di pusat tidak akan mungkin terwujud, dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur yang sangat besar namun dengan anggaran yang terbatas. Oleh karena itu kita harus menemukan lokasi prioritas pembangunan yang tepat agar kebutuhan daerah dapat merata dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, serta menghasilkan nilai tambah pendapatan masyarakat di daerah yang saat ini terdampak pandemi Covid-19. *

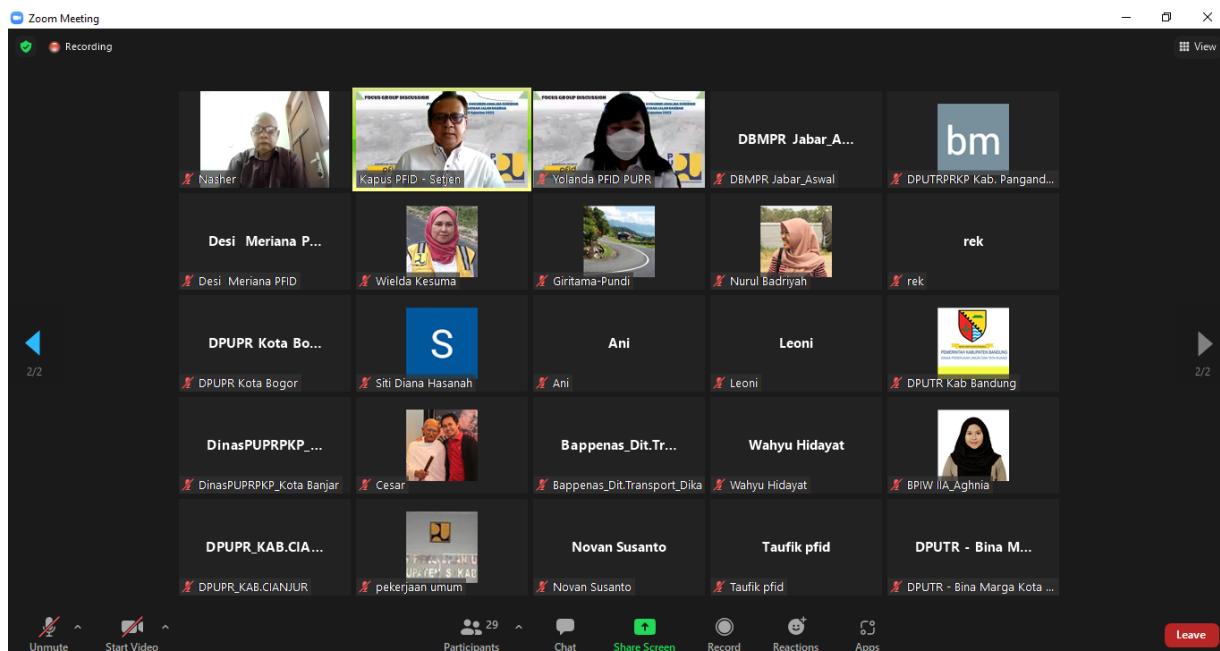
FOCUS GROUP DISCUSSION

PEKERJAAN PENYUSUNAN TEMPLATE

DOKUMEN ANALISA KORIDOR PRIORITISASI

PEMBIAYAAN JALAN DAERAH

Oleh : Brigitta Yolanda P.P



Peserta Kegiatan FGD melalui Aplikasi Zoom

Salah satu infrastruktur ke-wenangan daerah yang perlu diperkuat untuk memenuhi target RPJMN adalah jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota (jalan daerah), yang mencakup sekitar 90% dari total jaringan jalan di Indonesia. RPJMN telah menargetkan kemantapan jalan provinsi sebesar 75% dan jalan kabupaten / kota sebesar 65%. Namun sampai dengan akhir tahun 2019 masih terjadi backlog keman-tapan jalan sekitar 60%. Secara teknis Kementerian PUPR telah melakukan 3 pendekatan untuk mencapai target tersebut, yaitu:

1. Bimbingan Teknik, Kementerian PUPR menyusun, mengeluarkan dan melakukan sosialisasi/bimbingan teknik NSPK terkait jalan daerah

2. Kementerian PUPR mengalo-kasikan dana dan melakukan penanganan jalan daerah di kawasan strategis nasional atau untuk kepentingan strategis lainnya yang dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang diputuskan oleh Presiden/Menteri

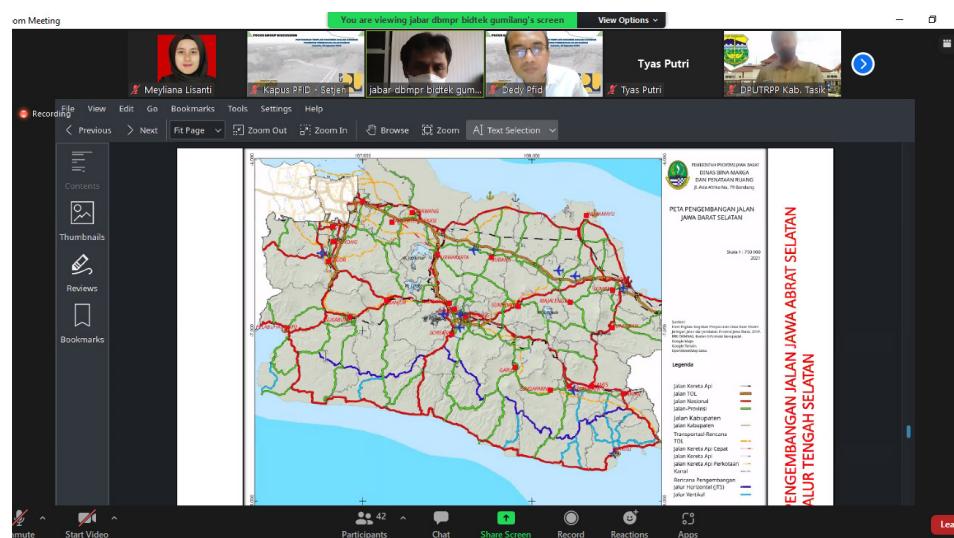
3. Kementerian PUPR melakukan pendampingan pemrograman dan persetujuan atas Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Jalan kepada Pemerintah Daerah penerima DAK serta Monitoring dan Evaluasi.

Kondisi dan permasalahan pe-nyelenggaraan jalan daerah belum sesuai dengan target dan sasaran RPJMN atau rencana strategis ter-kait pencapaian kemantapan jalan.

Hal ini khususnya terkait dengan perencanaan umum dan prioritisasi penanganan Jalan yang di-dasarkan pada koneksi antar jaringan, antar moda dan aksesibilitas ke pusat kegiatan. Standard perencanaan umum dan prioritas penanganan jalan saat ini dirasa masih belum jelas, sehingga suatu acuan berupa template dokumen penyusunan prioritas pembiayaan berdasarkan pendekatan analisa koridor yang memperhatikan parameter-parameter seperti keterhubungan antara inlet/outlet dengan jaringan Jalan menuju Kawasan tertentu atau antar hierarki jaringan serta rencana tata ruang atau dokumen kebijakan lainnya. Sehingga diperlukan adanya suatu kegiatan konsultasi dalam pembahasan ini dengan mengundang berbagai narasumber.

Pada Hari Senin, 16 Agustus 2021 dilaksanakan FGD (*Focus Group Discussion*) kegiatan jasa konsultasi "Pekerjaan Penyusunan Template Dokumen Analisa Koridor Prioritisasi Pembiayaan Jalan Daerah" melalui *Video Conference Zoom Meeting*. Penyusunan template dokumen Analisa koridor ini mengambil *pilot project* di Koridor Bandung - Halimun - Ciletuh dan Koridor Bandung - Tasik - Pangandaran. Kegiatan ini dipimpin oleh Bapak Dedy Gunawan, dan dihadiri oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Direktorat Jenderal Bina Marga, BPIW Wilayah II, Bappenas, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Dinas PUPR - Bina Marga Kabupaten/Kota, Direksi PT. Giritama Persada, Tim Konsultan, Tim Teknis (Ketua, Sekretaris, Anggota). Pak Riono Suprapto, SE. ST., MT, Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah membuka kegiatan ini dengan mengatakan bahwa diharapkan dengan kegiatan ini tercipta keseragaman pemahaman mengenai prioritas pembiayaan jalan daerah dan pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun usulan pembiayaan jalan daerah.

Narasumber pertama dalam FGD ini adalah Pak Ahmad Zainudin, Perencana Ahli Madya Koordinator Bidang Jalan dari Direktorat Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas. Beliau memaparkan tentang Rencana Pengembangan Transportasi Multimoda di Jawa Barat bagian Selatan. Melihat dari koridor yang diambil sebagai pilot project maka dapat dilihat tujuan utamanya adalah pengembangan wilayah selatan. Namun jika diambil efektifitasnya maka prioritas mengusulkan yang barat terlebih dahulu dan perlu melihat keluar masuk dari jalur Tol Cigatas. Selain itu beliau menyarankan agar Pemerintah Dinas Bina Marga dan



You are viewing Zainudin | Bappenas' screen

View Options ▾

Ketimpangan Jawa Barat Bagian Utara dan Selatan (4/4)
"Kondisi Konektivitas Jabar Selatan relatif terbatas"

Sebaran Kondisi Jalan di Provinsi Jawa Barat

Map of West Java provinces showing road connectivity percentages:

Provinsi	Tingkat Mantap Jalan (%)
KOTA BEKASI	96%
BEKASI	87%
KARAWANG	82%
SUBANG	75%
INDRAMAYU	88%
INDRAMAYU	95%
CIREBON	82%
KOTA DEPOK	100%
KOTA TANGERANG	89%
PURWAKARTA	92%
WAHANA	90%
WAHANA	92%
BANDUNG	86%
SUMEDANG	80%
MALANGKA	83%
KUNINGAN	70%
GARUT	63%
SUKABUMI	63%
GUJARAT	43%
CIAMIS	90%
CIAMIS	74%
TASIKMALAYA	70%
GARUT	70%

Legenda

- Rumah tangga miskin
- Rumah tangga sejahtera

DPUTR - Bina M... Yolanda PFID P...
DPUTR - Bina Marga ... Yolanda PFID PUPR

Zainudin | Bappenas

Participants 37 Chat Share Screen Record Reactions Apps

Penataan Ruang Jawa Barat perlu ada diskusi terkait pendanaan terhadap jaringan jalan yang menjadi prioritas nantinya. Daerah perlu mengusulkan kepada pusat dan provinsi dengan adanya keterbu-kaan APBD daerah, agar dapat pembiayaannya dapat diusulkan secara efesien dan tepat sasaran pada jalur tengah.

Narasumber yang kedua adalah Ibu Rinaningtyas A. Putri, Subkoordinator Sistem Jaringan / Perencana Ahli Muda dari Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR. Beliau memaparkan tentang Rencana Pengembangan Jalan Nasional mendukung Jawa Barat bagian Selatan. Berdasarkan paparan ini, maka dapat disinkronkan antara rencana kegiatan penanganan jalan kewenangan pemerintah pusat dengan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Pak Gumlilang selaku Kepala Bidang Teknik Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat juga turut hadir memaparkan tentang Pengembangan Jaringan Jalan Daerah di Jawa Barat bagian

Selatan. Beliau menjelaskan bahwa Jalan Nasional pada koridor tersebut adalah ruas jalan Cidaun sampai Ciwidey. Kemudian dijelaskan Cidaun sampai Rancabuaya sering terjadi bencana dan memiliki jarak yang jauh. Jalur tengah dan selatan perlu sinkronisasi ruas jalan supaya sama. Pak Gumilang berpendapat perlu memprioritaskan beberapa hasil pertimbangan untuk pemilihan indentifikasi, agar mimpi peningkatan jaringan jalan tengah dapat terwujud. Jalan koridor bagian barat yang perlu diprioritaskan adalah dari arah Bandung - Ciwidey - Cianjur - Sagaranten - Geopark Ciletuh, dikarenakan beberapa potensi pertambangan dan mineral serta potensi pariwisata sangat besar dibandingkan dengan yang timur. Sementara untuk koridor timur sebelumnya sudah ada kajian dan tindaklanjut, jadi harapan dari Dinas Provinsi Jawa Barat adalah perlu memprioritaskan koridor barat

Terdapat pula beberapa masukan dalam FGD ini yaitu dari Pak Toni Waskito, Staff Direktorat Transportasi Bappenas. Diharapkan dapat fokus di lintas tengah

selatan karena menjadi konsentrasi Gubernur Jawa Barat. Penentuan prioritas ini perlu dibantu tim konsultan untuk memilih atau menetapkan prioritas jalan. Selain itu perlu dibuat juga pendekatan awal apakah untuk mendukung pelayanan dasar atau ke pendukung ekonomi (pariwisata). Selanjutnya melakukan perumusan *timeline* untuk pengembangannya ke arah mana (pariwisata atau pelayanan dasar atau beriringan).

Pak Dedy Gunawan ST, M. Sc., selaku Ketua Tim Teknis saat itu, menyarankan agar melakukan konfirmasi ke Bappeda terutama yang jalur tengah selatan. Dengan setelah melihat prioritas pada koridor tersebut, maka kemudian akan melihat kondisi dari jalan pada koridor tersebut dan selanjutnya bisa melihat *readiness criteria* juga untuk penanganan ruas jalan pada koridor tersebut. Perlu adanya bantuan dan arahan dari daerah untuk beberapa informasi, dikarenakan masih belum ada tanggapan mengenai usulan atau masukan pada beberapa trase jalan.

Berdasarkan masukan dan diskusi Tim Konsultan dengan seluruh peserta FGD yang hadir dalam rapat, maka fokus jalur yang menjadi prioritas perlu dilaksanakan diskusi dan penilaian kembali dari berbagai sector. Namun dengan adanya kegiatan ini, dapat dilihat ruas-ruas jalan yang menjadi prioritas. Selain itu juga dapat mengambil indikator apa saja yang dapat digunakan nantinya dalam melakukan penyusunan Template Dokumen Analisa Koridor Prioritisasi Pembiayaan Jalan Daerah yang nantinya diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menentukan kegiatan penanganan jalan secara tepat guna dan target RPJMN juga menjadi tercapai *



BINWAS DAK BIDANG AIR MINUM, SANITASI, DAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN TA 2021

Oleh : Leviana Okvianty, Pujiati Rahayu

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 Pasal 1 bahwa Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, dan pemantauan penyelenggaraan fasilitasi infrastruktur daerah. Sehubungan dengan tugas pembinaan tersebut, tercantum pada Pasal 18 bahwa tugas dan tanggung jawab tim koordinasi pusat diantaranya ialah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

melakukan pemantauan melalui sistem E-Monitoring DAK dan koordinasi ke daerah, melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan dan percepatan pencapaian progress fisik dan keuangan DAK di daerah. Sebagai tindaklanjut dari amanah Permen PUPR tersebut serta bertepatan dengan telah berakhirnya penyaluran tahap 1 kegiatan DAK TA 2021 yang semula pada tanggal 21 Juli 2021 menjadi 31 Agustus 2021, maka Kementerian PUPR melalui Bidang Pelaksanaan DAK Perumahan dan Permukiman, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan acara Pembinaan dan Pengawasan DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan & Permukiman. Tujuan

pelaksanaan acara ini yaitu :

1. Mengetahui progress pelaksanaan dan mendorong pemerintah daerah untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan & Permukiman TA 2021;
2. Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan percepatan DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan & Permukiman TA 2021;
3. Menginformasikan urgensi pelaporan kegiatan DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan & Permukiman TA 2021 sebagai salah satu syarat pengusulan DAK tahun anggaran selanjutnya; dan
4. Menginformasikan tata cara pengukuran dan penginputan

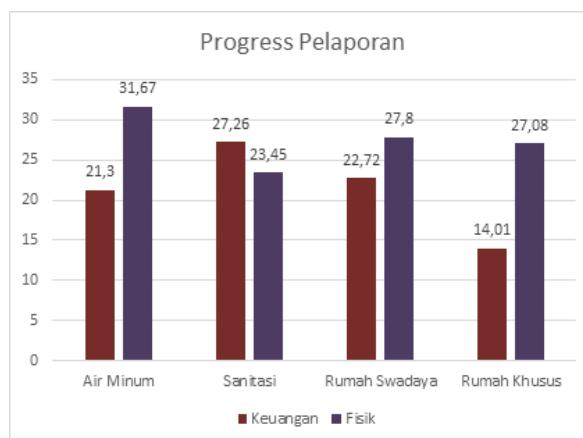
pada tahap pelaksanaan, hasil pelaksanaan, dan capaian hasil jangka pendek (immediate outcome) DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan & Permukiman TA 2021.

Acara ini dibagi menjadi dua gelombang, yaitu:

1. Gelombang 1 untuk wilayah Sumatera dan Jawa pada 13-14 September 2021; dan
2. Gelombang 2 untuk wilayah Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua pada 20-21 September 2021;

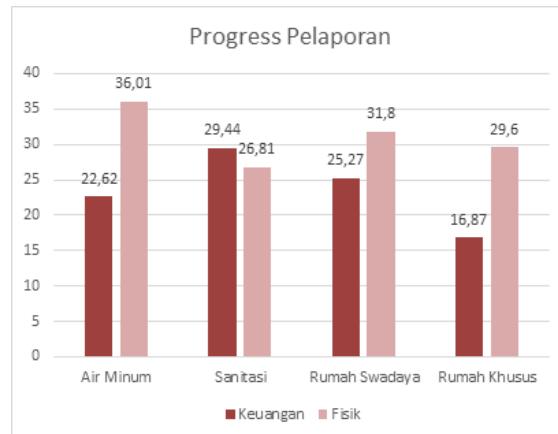
Acara ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari yang diawali dengan arahan dan pembukaan oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, dan dilanjutkan dengan sesi pemaparan oleh narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian PPN / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PUPR. Pada sesi siang dilaksanakan sesi coaching clinic mengenai tata cara pengukuran dan penginputan Immediate outcome DAK pada e-Monitoring DAK dengan pembicara dari Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah. Setelah itu dilaksanakan sesi desk terkait progress pelaksanaan TA 2021 dan pemahaman terhadap Immediate outcome DAK kepada SKPD kabupaten/kota yang hadir langsung maupun daring menggunakan aplikasi Zoom yang dilanjutkan hingga hari kedua. Pada sesi desk ini dibuat lembar kendali untuk pendataan progress pelaksanaan DAK di lapangan beserta catatan kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Peserta pada acara ini adalah Balai Prasarana Permukiman Wilayah, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan, dan SKPD pengampu air minum, sanitasi, dan perumahan & permukiman dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

A. Progress Pelaporan DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman TA. 2021



Sumber : e-Monitoring DAK per tanggal 10 September 2021

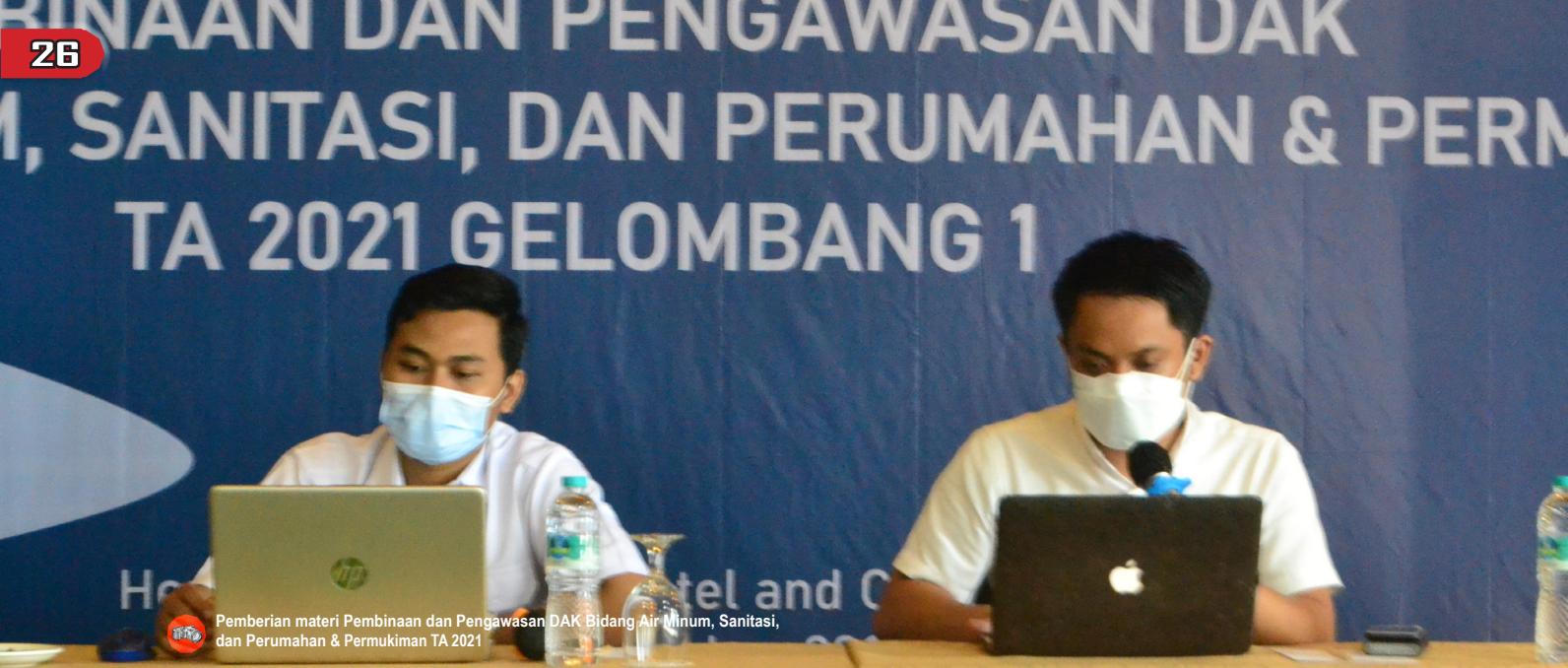
Berdasarkan grafik diatas, terlihat progress pelaporan bidang air minum, sanitasi, dan perumahan dan permukiman (rumah swadaya dan rumah khusus) pada e-Monitoring DAK per tanggal 10 September 2021 dengan rata-rata progress pelaporannya masih dibawah 30%. Setelah dilaksanakan acara gelombang 1 pada tanggal 13-14 September 2021 dan gelombang 2 pada tanggal 20-21 September 2021, progress pelaporan pada e-Monitoring DAK meningkat seperti pada grafik dibawah ini.



Sumber : e-Monitoring DAK per tanggal 24 September 2021

Berdasarkan grafik diatas, progress pelaporan fisik bidang air minum meningkat lebih pesat dari bidang lainnya yaitu dari yang sebelumnya sebesar 31,67 % menjadi 36,01 %. Pada saat pelaksanaan acara, diketahui beberapa hal yang menyebabkan pelaporan di e-Monitoring DAK masih rendah, diantaranya yaitu :

1. Kurangnya kesadaran pemerintah daerah untuk melaporkan progress di e-Monitoring DAK. Beberapa telah melaporkan di OMSPAN, namun tidak dilanjutkan dengan melakukan pelaporan pada e-Monitoring DAK; dan
2. Pergantian petugas e-Monitoring DAK sehingga perlu penyesuaian dalam penginputan pelaporan DAK.



B.Pelaksanaan DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman TA. 2021

Bidang	Alokasi	RK	Kontrak	Salur	%Salur
Air Minum	2,977,364,075,000	2,977,091,906,875	2,772,993,332,108	1,114,746,169,000	37.4%
Sanitasi	1,974,663,982,000	1,974,526,060,978	1,955,569,127,026	817,747,571,831	41.4%
Perumahan dan Permukiman	975,784,325,000	975,784,324,490	947,274,469,742	381,204,254,707	39.1%

Sumber : Dit. Dana Transfer Khusus, DJPK, Kemenkeu

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa penyaluran DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan & Permukiman TA 2021 sudah cukup baik dengan rata-rata sudah diatas 35 %. Terdapat beberapa daerah yang sudah penyaluran tahap dua, sementara sebagian besar masih penyaluran tahap 1. Pada sesi desk, diketahui beberapa kendala dan permasalahan pada pelaksanaan DAK di daerah, diantaranya:

1. Perlibatan APIP daerah untuk menjaga *governance* dan akurasi laporan penyerapan dana dan capaian output masih terkendala jumlah dan kapabilitas SDM APIP yang masih terbatas. Hal ini mengakibatkan reviu APIP yang cukup lama sehingga memperlambat proses penyaluran;
 2. Masih terdapatnya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan DAK Fisik seperti permasalahan pengadaan barang/jasa dan keterlambatan proses administrasi di daerah;
 3. Kesalahan input kode rekening dalam SIPD;
 4. Mutasi, rotasi, dan promosi di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak disertai dengan transfer knowledge kepada pegawai yang baru mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan DAK; dan
 5. Ketidaksesuaian jumlah output terbangun dengan jumlah output yang telah disetujui pada RK. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu :
 - Pada saat pengusulan DAK bidang air minum dan sani-
- tasi, dinas teknis terkait beserta Bappeda tidak melakukan survei lapangan secara maksimal sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan DAK perlu dilakukan penyesuaian karena DED yang telah disusun diawal dan yang sudah disetujui bersama, tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan;
- Ketidaksesuaian DED yang telah disusun dengan kondisi real di lapangan mengakibatkan pemerintah daerah harus mengurangi jumlah SR yang biayanya kemudian dialihkan untuk pembelian komponen lainnya;
 - Untuk bidang perumahan, penerima bantuan meninggal atau tidak mampu berswadaya sehingga tidak dapat mencapai output yang ditargetkan di awal *



Pelaksanaan acara Pembinaan dan Pengawasan DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan & Permukiman TA 2021

C. Evaluasi dan Pelaporan DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan & Permukiman

Evaluasi Pemanfaatan DAK bertujuan agar terjadi kesesuaian antara masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan kemanfaatan (*benefit*) kegiatan

yang dibiayai DAK. Pelaporan DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman yang harus diinput oleh pemerintah daerah ialah pelaporan pe-

laksanaan, pelaporan output, dan pelaporan outcome. Secara rinci pelaporan tersebut dijabarkan di tabel berikut ini.

1. Pelaporan Pelaksanaan

Lokasi		Kegiatan		Neraca Keuangan			Progres	
Kecamatan	Desa	Menu	Rincian	Pagu RK (Rp)	Kontrak (Rp)	Realisasi	Keuangan (%)	Fisik (%)
Nama Kecamatan	Nama Desa	Diisi sesuai Bidang	Diisi sesuai Bidang	Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RK	Nilai yang tercantum pada dokumen kontrak atau RKM	Besar DAK yang telah dibelanjakan	Persentase pagu DAK yang telah dibelanjakan	Persentase realisasi fisik



2. Pelaporan Output

AIR MINUM

No.	Output
1	Debit (L/s)
2	Reservoar (m3)
3	Pipa (m)
4	SR (Unit)
5	HU (Unit)

SANITASI AIR LIMBAH

No.	Output
1	Sarana (Unit)
2	SR (Unit)

PERSAMPAHAN

3	Bangunan TPS 3R
4	Alat Sortir Sampah
5	Alat Komposting
6	Motor Sampah

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

No.	Output
1	Rumah (Unit)

3. Pelaporan Outcome

Seperi yang telah diketahui pada Perpres Nomor 123 Tahun 2020 Pasal 8 bahwa Kepala Daerah perlu menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas laporan : realisasi penyerapan dana, capaian keluaran kegiatan, pelaksanaan teknis kegiatan, dan capaian hasil jangka pendek. Laporan capaian hasil jangka pendek disampaikan paling lambat bulan Maret tahun 2022 setelah pelaksanaan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Laporan disampaikan melalui aplikasi dan dilakukan berbagi pakai data antara Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian

Dalam Negeri, Kementerian Negara/Lembaga, dan gubernur. Kementerian PPN/Bappenas dalam acara ini menyampaikan usulan terkait pemanfaatan pelaporan Immediate outcome DAK Fisik yang terbagi menjadi 3 opsi, yaitu :

Opsi 1 : Sebagai salah satu indikator penilaian usulan DAK Fisik Tahun 2023 (pembobotan tertentu)

Opsi 2 : Sebagai salah satu indeks yang dipergunakan dalam pengalokasian

Opsi 3 : Sebagai prasyarat utama dalam pengusulan DAK Fisik Tahun 2023 oleh Pemda

Pilihan opsi diatas akan menjadi diskresi antara K/L dan Direktorat sektor Bappenas setelah berkoordinasi dengan pengampu lainnya, dan masih dalam tahap pembahasan di tingkat pusat. Kebijakan terkait hal tersebut akan disosialisasikan kepada pemerintah daerah pada Bulan Desember Tahun 2021. Pada acara ini juga disampaikan secara lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengukuran dan penginputan immediate outcome (capaian hasil jangka pendek) untuk DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman. Tiap bidang tersebut memiliki masing-masing indikator yang dapat diukur segera setelah infrastruktur selesai terbangun. Berikut ini merupakan indikator masing-masing bidang:

zoom.us Meeting View Edit Window Help

49% 49% Mon 20 Sep 12.10

Zoom Meeting

Recording

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAK
BIDANG AIR MINUM, SANITASI, DAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN
TA 2021 GELOMBANG 2

Hotel Ibis Gading Serpong
20 - 21 September 2021

PERKIM PFID

Bagas - PFID

Kemendagri_Randy_Keuda

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah
Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAK
BIDANG AIR MINUM, SANITASI, DAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN
TA 2021 GELOMBANG 2

No. Outcome (Realisasi/Jiwa)

- 1 Sumber Air
- 2 Kuantitas
- 3 Kualitas
- 4 Kontinuitas
- 5 Keterjangkauan Lokasi
- 5 Keterjangkauan Tarif

No. Outcome (Realisasi/Jiwa)

- 1 Penggunaan
- 2 Jenis Kloset
- 3 Pengolahan Air Limbah
- 4 Pengolahan Lumpur Tinja

No. Outcome (Realisasi/Jiwa)

- 1 Ketahanan Bangunan
- 2 Kecukupan Luas
- 3 Akses Air Minum
- 4 Akses Sanitasi

Acara Pembinaan dan Pengawasan DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan & Permukiman TA 2021 melalui Aplikasi Zoom

AIR LIMBAH

No.	Outcome (Realisasi/Jiwa)
1	Sumber Air
2	Kuantitas
3	Kualitas
4	Kontinuitas
5	Keterjangkauan Lokasi
5	Keterjangkauan Tarif

SANITASI AIR LIMBAH

No.	Outcome (Realisasi/Jiwa)
1	Penggunaan
2	Jenis Kloset
3	Pengolahan Air Limbah
4	Pengolahan Lumpur Tinja

PERSAMPAHAN

5	Neraca Sampah (kg/hari)
6	Jumlah Jiwa terlayani

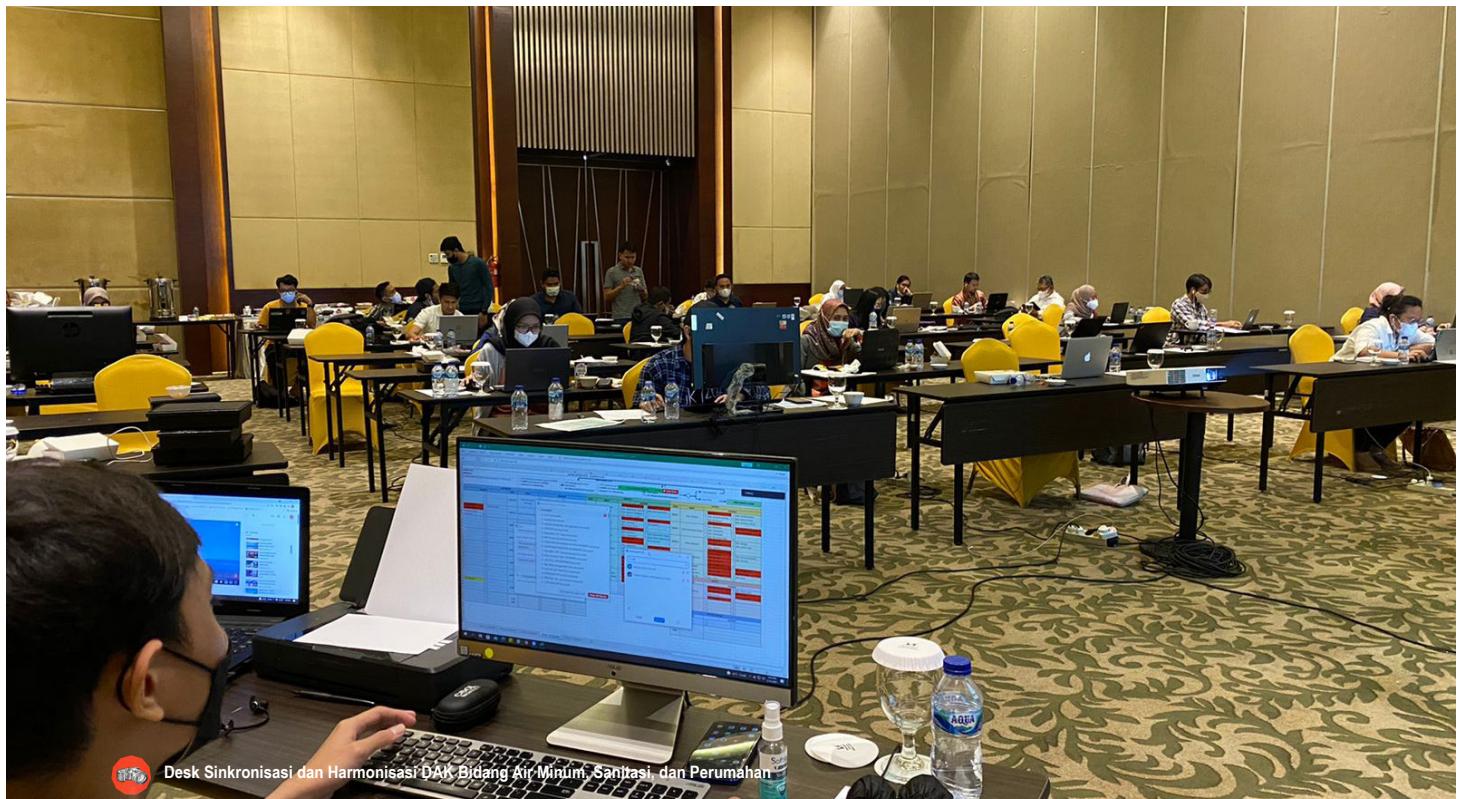
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

No.	Outcome (Realisasi/Jiwa)
1	Ketahanan Bangunan
2	Kecukupan Luas
3	Akses Air Minum
4	Akses Sanitasi

Diharapkan dengan adanya pelaporan immediate outcome ini dapat mengontrol pelaksanaan kegiatan DAK di daerah serta mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan DAK secara maksimal, sehingga pengelolaan DAK di daerah dapat terlaksana lebih baik dan penerima manfaat dapat merasakan dampak yang optimal dari kegiatan yang didanai oleh DAK *

SINKRONISASI DAN HARMONISASI DAK BIDANG AIR MINUM, SANITASI, DAN PERUMAHAN TA. 2022

Oleh : Rethon Muliana, Afirma Kitania



Perencanaan DAK TA. 2022 memasuki tahap Sinkronisasi dan Harmonisasi, yang dimulai pada 4 Agustus - 27 Agustus 2021. Forum sinkronisasi dan harmonisasi bertujuan untuk mengkoordinasikan, mendiskusikan, dan mengkonfirmasi usulan rencana kegiatan yang sebelumnya telah dinilai oleh pemerintah pusat untuk selanjutnya dilanjutkan sebagai usulan prioritas pemerintah daerah. Untuk mempersiapkan terselenggaranya forum sinkronisasi dan harmonisasi ini, satu minggu sebelum pelaksanaan kegiatan, dilakukan rapat persiapan dengan mengundang

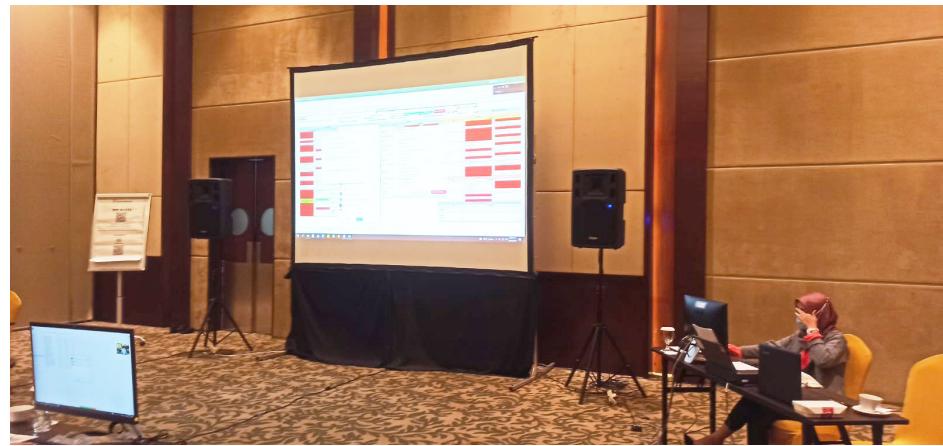
Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas yang akan menjadi petugas *desk* pada kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi. Selain itu, dilakukan juga penyebaran informasi mengenai rencana penyelenggaraan dan konsep penilaian usulan rencana kegiatan DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan & Permukiman TA. 2022 kepada unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR (Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan), Balai Prasarana Permukiman Wilayah, dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan.

Penyebaran informasi mengenai tata cara pelaksanaan dan terkait dokumen readiness criteria yang perlu dipersiapkan pemerintah daerah dilakukan beberapa hari sebelum pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi melalui surat undangan yang dikirimkan kepada Pemerintah Daerah.

Kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi ini melibatkan peserta dari unsur internal Kementerian PUPR yang berasal dari unit kerja pengampu DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan & Permukiman TA. 2022 antara lain Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur

Permukiman, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Air Minum, Direktorat Sanitasi, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Rumah Swadaya, dan Direktorat Rumah Khusus serta mengundang Direktorat Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas. Metodelogi pelaksanaan kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan dengan daring melalui video conference. Koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dari awal persiapan hingga pelaksanaan. Adapun pelaksanaan Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan & Permukiman TA. 2022 dilaksanakan 3 Gelombang (wilayah barat, tengah, dan timur)

Kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi ini dimulai dengan sambutan dari Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah bapak Riono Suprapto, SE., ST., MT. dan dihadiri oleh Dinas Teknis pengusul DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan & Permukiman dari wilayah barat, tengah, dan timur. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai mekanisme forum konsultasi sinkronisasi dan harmonisasi oleh Subkoordinator Perencanaan dan Pemrograman Pelaksanaan DAK



Perumahan dan Permukiman. Selama 5 (lima) hari, pemerintah daerah melakukan konsultasi dengan para petugas desk masing-masing bidang untuk mengkonfirmasi hasil penilaian usulan, pengecekan kesiapan *readiness criteria*, dan melakukan pemrioritasan terhadap usulan rencana kegiatan pemerintah daerah pada aplikasi KRISNA DAK.

Fase sinkronisasi dan harmonisasi ini merupakan tahapan penilaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 yang ke-2 yang menghasilkan daftar singkat (*shortlist*) usulan rencana kegiatan, termasuk ranking urutan usulan prioritas. Pada fase sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan proses konfirmasi kepada pemerintah daerah terkait beberapa hal yang perlu didiskusikan seperti kesesuaian rincian menu, lokasi prioritas, cara pengadaan,

volume kegiatan, dan kewajaran harga satuan. Selain mengkonfirmasi usulan pemerintah daerah, pada fase sinkronisasi dan harmonisasi juga mengkonfirmasi usulan aspirasi anggota DPR - RI kepada pemerintah daerah yang masuk dalam usulan aspirasi tersebut. Terdapat 3 hasil penilaian pada fase ini yaitu *approve*, *stock program*, dan *reject*, usulan *approve* adalah usulan yang sudah memenuhi kriteria teknis / *readiness criteria* yang ada, usulan *stock program* adalah usulan yang secara kriteria teknis / *readiness criteria* sudah sejauh itu tetapi pagu total per kab/kota sudah melebihi pagu maksimal yang sudah disepakati, sedangkan usulan *reject* adalah usulan yang tidak memenuhi kriteria teknis / *readiness criteria*. Terlampir hasil sinkronisasi dan harmonisasi DAK Fisik bidang Air minum, Sanitasi, dan Perumahan *

BIDANG	PAGU (Juta)	USULAN			USULAN APPROVED		
		PEMDA	USULAN	NILAI (Juta)	PEMDA	USULAN	NILAI (Juta)
AIR MINUM	3,000,000	499	8,217	11,528,571	470	4,613	4,447,447
SANITASI	2,000,000	492	10,856	6,228,772	477	6,784	3,553,257
PERUMAHAN	1,000,000	469	6,086	9,317,075	244	1,474	1,071,102
A. RUSWA	850,000	455	6,085	10,848,181	223	1,439	927,267
B. RUSUS	150,000	50	332	2,373,108	32	439	143,835



CAPAIAN MANFAAT PENGELOLAAN DAK WILAYAH TIMUR DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

Oleh : Indra Jaya KGP

Pemerataan pembangunan di Indonesia diharapkan terus membawa perubahan positif diseluruh Bidang Infrastruktur PUPR. Pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan memiliki tujuan tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Melalui Dana Alokasi Infrastruktur Bidang PUPR, Pemerintah pusat memiliki harapan dapat memicu peningkatan Infrastruktur daerah yang berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi daerah. Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) melalui Bidang Perencanaan Fasilitasi Infrastruktur Daerah (Perencanaan FID) terus menerus melaksanakan penyusunan, koordinasi dan pembinaan teknis keterpaduan peren-

canaan penyelenggaraan fasilitasi infrastruktur daerah. Dalam rangka melaksanakan amanah Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Infrastruktur PUPR pasal 22 terkait Pemantauan dan Evaluasi, bidang Perencanaan FID melaksanakan Monitoring Evaluasi berbasis output dan outcome di wilayah Nusa Tenggara Barat pada tanggal 12-14 Agustus 2021.

Monitoring Evaluasi berbasis output dan outcome di wilayah Nusa Tenggara Barat dilaksanakan sekaligus dengan pembuatan video dokumentasi hasil pelaksanaan DAK TA. 2020 Bidang Jalan dan Jembatan; Bidang Irigasi; Bidang Air Minum; Bidang Sanitasi; dan Bidang Perumahan. Tim Capaian Manfaat Pelaksanaan DAK

bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat dalam pelaksanaan Monev selama 3 hari. Dalam pelaksanaan kegiatan Monev wilayah timur ini, Tim Capaian Manfaat Pelaksanaan DAK tidak hanya mewawancarai OPD sebagai pelaksana kegiatan DAK, namun juga mewawancarai penerima manfaat langsung dari Infrastruktur DAK mulai dari pengguna jalan, pemilik warung di sekitar Infrastruktur DAK Jalan, petani dan warga sekitar Infrastruktur Bidang Irigasi, maupun Bidang Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Permukiman.

Hari pertama, Tim Capaian Manfaat Pelaksanaan DAK bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lombok Barat dan Dinas Perumah-



an dan Permukiman Kab. Lombok Barat mengunjungi beberapa titik lokasi Infrastruktur DAK Bidang Irigasi dan Bidang Perumahan. Di bidang Irigasi, Dana Alokasi Khusus Kab. Lombok Barat digunakan untuk merehabilitasi Bendung untuk mengatur aliran air agar dapat mengairi sawah secara merata ke sawah-sawah yang berada di D.I Keru Kab. Lombok Barat. Panjang saluran D.I Keru sepanjang 6 Kilometer dengan hamparan sawah mencapai 833 Hektar. Di bidang

Perumahan, Dana DAK Infrastruktur Kementerian PUPR dilaksanakan di Dusun Penimbung, Kab. Lombok Barat dengan kegiatan merehabilitasi rumah tidak layak huni.

Pada hari Kedua, Tim Capaian Manfaat Pelaksanaan DAK didampingi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat mengunjungi beberapa titik lokasi Infrastruktur DAK Bidang Air Minum dan Bi-

dang Sanitasi. Dalam pelaksanaan DAK Bidang Air Minum, Tim Capaian Manfaat DAK mengunjungi Desa Banyuurip Kab. Lombok Barat. Permasalahan masyarakat di Desa Banyuurip setiap tahun adalah kekurangan air bersih, namun dengan dibangunnya Reservoir di atas Bukit pada tahun 2020, permasalahan air sudah mulai teratasi. Kemudian di Bidang Sanitasi, Dana Alokasi Khusus digunakan untuk pembangunan Tangki Septik Individual di Desa Eyat Mayang, Kab. Lombok Barat. Selain itu, Tim Capaian Manfaat DAK mewawancara penikmat manfaat pelaksanaan DAK di bidang Sanitasi penerima tangki septik Individu. Sebelum dilaksanakan kegiatan DAK, para warga BAB sembarangan, namun setelah adanya kegiatan DAK pembangunan tangki septic individu, warga teratur untuk BAB di penampungan septic yang telah dibangun dan tidak memerlukan lingkungan.

Hari Terakhir, Tim Capaian Manfaat Pelaksanaan DAK didampingi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat memonitoring hasil dari pembangunan DAK Bidang Jalan di Kabupaten Lombok Tengah Ruas Kuta Keruak Kab. Lombok Tengah. Salah satu yang tim wawancara adalah pengguna jalan ruas Kuta Keruak, beliau menuturkan, "Dulu jalan berlubang dan licin sehingga disini rawan kecelakaan dan juga anak-anak yang mau pergi kesekolah aksesnya jauh, kalo misalnya warga awang mau berjualan ikan ke pasar itu waktunya bisa 5 jam lebih, yang tadinya ikannya segar menjadi tidak segar, tapi sekarang semenjak ada jalan yang diaspal dan layak dilalui, masyarakat bisa menempuh jalan menuju pasar itu bisa sekitar 30 menit sudah sampai di pasar".

FOCUS GROUP DISCUSSION MASUKAN DRAFT PETUNJUK TEKNIS DAK FISIK T.A. 2022

Oleh : Indra Jaya KGP



foto bersama acara Focus Group Discussion Masukan Draft Petunjuk Teknis DAK Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah dana yang bersifat stimulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membantu mendanai kegiatan khusus di daerah dalam bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan penyelenggaraan DAK dilaksanakan oleh penerima DAK mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pascapelaksanaan dengan tujuan utama adalah melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan memiliki target pembangunan berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Penyelenggara-

an DAK mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan sebagai upaya mewujudkan prioritas nasional di bidang irigasi, jalan, air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman.

Dalam mendukung penyelenggaran Dana Alokasi Khusus Fisik bidang Infrastruktur PUPR, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah mengadakan kegiatan Focus Group Discussion masukan Draft Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 bersama dengan Kementerian/Lembaga yang mengampu urusan DAK Infrastruktur PUPR. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Ciputra Jakarta pada tanggal 7-8 September 2021.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud sebagai upaya Ke-

menterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan masukan dalam penyusunan petunjuk teknis dan pembahasan awal petunjuk operasional dalam pelaksanaan DAK Infrastruktur PUPR Tahun 2022. Masukan-masukan yang diberikan oleh Unit Organisasi Teknis dan Balai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dirjen Perimbangan Keuangan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Perencanaan Pembangunan/BAPPENAS diperlukan sebagai perbaikan dan penyempurnaan petunjuk teknis DAK Fisik PUPR dengan mempertimbangkan masalah yang muncul pada penyelenggaraan DAK Infrastruktur PUPR sebelumnya (best practice).



Melalui Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Fisik Infrastruktur PUPR TA. 2022 yang disusun oleh Kementerian PUPR sebagai Turunan Petunjuk Teknis DAK Fisik TA. 2022 yang akan ditandatangi oleh Presiden Republik Indonesia diharapkan dapat mewujudkan beberapa target pembangunan diantara lain :

- a. Pelaksanaan DAK dibidang Irigasi untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan yang pelaksanaanya dilakukan melalui kegiatan pembangunan, peningkatan , dan rehabilitasi jaringan irigasi serta pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali banjir yang melindungi daerah irigasi kewenangan daerah.
- b. Pelaksanaan DAK dibidang Jalan untuk meningkatkan koneksi dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial (kawasan in-

Acara Focus Group Discussion Masukan Draft Petunjuk Teknis DAK Fisik

- sudut/kawasan ekonomi khusus, pertanian, perkebunan), pariwisata (kawasan strategis pariwisata nasional dan daerah), pelabuhan, bandar udara, mebuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau kecil dan terluar, dan transigrasi.
- c. Pelaksanaan DAK dibidang Air Minum dan Sanitasi untuk mewujudkan 100% akses air minum yang berkelanjutan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), percepatan pembangunan di daerah afirmasi, serta prioritas nasional diantaranya percepatan penurunan stunting, untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)
- d. Pelaksanaan DAK dibidang Perumahan dan Permukiman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan perumahan dan permukiman beserta Prasarana, sarana dan utilitas umum layak di permukiman kumuh dan mendukung pelayanan dasar daerah kabupaten/kota pada SPM Perumahan Rakyat, serta dalam rangka pencegahan kumuh di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, daerah perbatasan negara, serta Provinsi Papua dan Papua Barat *

PERINGATAN HUT RI KE 76 DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

76TH

INDONESIA
TANGGUH
INDONESIA
TUMBUH

